

AKSES  TERBUKA **ARTIKEL**

Diterima

25 September 2023

Disetujui

07 Desember 2023

Ditebitkan

Desember 2023

DOI

Peran Pemerintah Dalam Manajemen Strategi Pengelolaan Desa Wisata di Daerah Kepulauan

(The Role of Government In Management of Tourism Village Management Strategies in Archipelago)

Marliani

Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Proklamasi 45, Yogyakarta. Indonesia.

✉ marliani645@gmail.com

Abstrak: Desa wisata di daerah kepulauan menjadi sebuah potensi pariwisata yang penting bagi Indonesia. Namun, pengembangan desa wisata kepulauan memerlukan peran penting dari pemerintah sebagai pengelola dan pengatur utama. Penelitian menggunakan metode post-positivisme dengan pendekatan teori manajemen strategi, menunjukkan bahwa pemerintah perlu memimpin rencana strategis, meningkatkan keterampilan masyarakat, membangun infrastruktur pariwisata, memfasilitasi pemasaran, dan meningkatkan pemberian informasi. Pemerintah juga harus memonitor dan mengawasi operasional desa wisata kepulauan untuk menjaga keaslian budaya dan kearifan lokal. Dalam pemilihan strategi, pemerintah harus memperhatikan faktor internal dan eksternal, seperti ketersediaan sumber daya manusia dan pesaing desa wisata dalam pengembangan desa wisata kepulauan yang berkelanjutan. Masyarakat lokal juga memegang peranan penting dalam pengembangan desa wisata di daerah kepulauan. Dengan kerjasama antara pemerintah, pengelola desa wisata kepulauan dan masyarakat lokal, diharapkan dapat tercipta sebuah ekosistem pariwisata yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Pengembangan desa wisata di daerah kepulauan dapat menjadi alternatif atau diversifikasi sumber pendapatan bagi masyarakat setempat, serta memberikan kesempatan baru dalam pengembangan potensi pariwisata di Indonesia.

Kata kunci: Peran pemerintah; Manajemen Strategi; Desa Wisata Kepulauan

Abstract: *Tourist villages in archipelagic areas have an important tourism potential for Indonesia. However, the development of island tourism villages requires an important role from the government as the main manager and regulator. Research using post-positivism methods with a strategic management theory approach shows that the government needs to lead strategic plans, improve community skills, build tourism infrastructure, facilitate marketing, and improve information provision. The government must also monitor and supervise the operations of island tourist villages to maintain the authenticity of local culture and wisdom. In choosing a strategy, the government must pay attention to internal and external factors, such as the availability of human resources and tourist village competitors in the sustainable development of island tourist villages. Local communities also play an important role in developing tourist villages in island areas. With collaboration between the government, island tourism village managers, and local communities, it is hoped that a sustainable tourism ecosystem can be created and provide benefits for all parties involved. The development of tourist villages in archipelagic areas can be an alternative or diversified source of income for local communities, as well as provide new opportunities for developing tourism potential in Indonesia.*

Keywords: *Government Role; Strategic Management; Tourism Village Archipelago*

I. PENDAHULUAN

Desa wisata adalah sebuah kawasan desa yang dikembangkan menjadi objek wisata yang menawarkan pengalaman budaya, alam, dan kehidupan di desa kepada pengunjung (Antara & Arida, 2015). Desa wisata bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui pengembangan wisata yang berkelanjutan, menjaga keberagaman budaya dan kearifan lokal, serta mempromosikan konservasi lingkungan dan alam (Gurvantry et al., 2022; Irhandayaningsih, 2019). Desa wisata juga menjadi ajang untuk memperkenalkan dan mempromosikan produk-produk lokal serta warisan budaya yang dimiliki oleh desa tersebut (Purwanti, 2019; Syah, 2017).

Desa Wisata merupakan salah satu bentuk pengelolaan pariwisata di kawasan pedesaan yang dilakukan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan (Arifin, 2017; Raharjana, 2010). Desa Wisata memanfaatkan potensi alam dan budaya di desa sebagai daya tarik wisata yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keberlangsungan lingkungan (Okparizan et al., 2019; Ruwanti & Siti, 2020). Perkembangan Desa Wisata di Indonesia semakin pesat sejak diluncurkannya program Desa Wisata oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada tahun 2015. Program ini bertujuan untuk mengembangkan desa-desa yang memiliki potensi wisata yang bisa meningkatkan pendapatan masyarakat desa (Gautama et al., 2020).

Melalui program ini, Desa Wisata di Indonesia menjadi semakin dikenal dan dikembangkan dengan membawa dampak positif bagi masyarakat lokal dan para wisatawan. Masyarakat desa yang sebelumnya mengalami keterbatasan dalam mengembangkan potensi wisata, kini mendapatkan akses pendampingan dan pelatihan dari pemerintah sehingga bisa mengelola potensi

wisata secara mandiri (Abdi et al., 2019; Putra, 2013). Desa Wisata sendiri memiliki berbagai macam bentuk pengembangan, antara lain pengelolaan objek wisata alam, objek wisata sejarah, objek wisata budaya dan tradisional, serta pengelolaan produk wisata seperti produk makanan, kerajinan tangan, atau produk-produk lokal lainnya. Pengembangan Desa Wisata yang baik akan meningkatkan kualitas dan daya tarik wisata, serta membawa dampak positif bagi masyarakat lokal (Hermawan, 2016; Husni & Safaat, 2019; Trisnawati et al., 2018).

Namun demikian, proses pengembangan Desa Wisata tetap harus diiringi dengan upaya menjaga keberlangsungan lingkungan dan *culture conservation*. Pengelolaan wisata yang tidak benar dapat merusak lingkungan dan menjadikan budaya dan tradisi di desa menjadi 'terkotak-kotak' dan kehilangan esensi aslinya (Rahma & Primasworo, 2018; Tim Asisten Penelitian Autorin, 2021). Dengan demikian, pengembangan Desa Wisata harus dijalankan dengan seimbang antara profit, people, dan planet. Pemerintah bersama masyarakat lokal dan stakeholder lainnya perlu bekerja sama untuk mengelola Desa Wisata secara berkelanjutan agar menjadi destinasi wisata yang menguntungkan bagi masyarakat lokal serta meningkatkan ekonomi desa secara menyeluruh (Anggraini et al., 2022; Hamid et al., 2020; Nofiyanti et al., 2018).

Manajemen strategi desa wisata di Indonesia dapat diartikan sebagai sebuah proses pengelolaan pengembangan desa wisata untuk mencapai target yang telah ditentukan. Tujuan utama dari manajemen strategi desa wisata di Indonesia adalah untuk meningkatkan kualitas produk wisata, meningkatkan jumlah kunjungan wisata, serta meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar kawasan wisata (Hutabarat, 2006; Ritonga, 2020). Manajemen strategi yang baik juga dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan fasilitas di daerah wisata serta memberi peluang karir yang

lebih baik bagi penduduk setempat. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk memperkenalkan budaya Indonesia dan keindahan kawasan alam di Indonesia kepada wisatawan domestik dan internasional. Oleh karena itu, manajemen strategi desa wisata di Indonesia harus dapat mengembangkan program dan kegiatan yang dapat menarik minat wisatawan serta memperkuat kemitraan dengan pihak terkait seperti pemerintah dan masyarakat lokal (Istriyani, 2021; Sesotyaningtyas & Manaf, 2015; Widnyani, 2022).

Desa-desi wisata ini menawarkan pengalaman wisata yang berbeda dibandingkan dengan destinasi wisata konvensional, yakni dengan menampilkan kebudayaan dan kehidupan sehari-hari masyarakat setempat. Namun, masih banyak desa wisata di Indonesia yang belum terkelola dengan baik dan memerlukan perhatian lebih dari pemerintah dan masyarakat lokal. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain kekurangan infrastruktur, akses transportasi yang sulit, serta kebiasaan masyarakat untuk melakukan kegiatan ilegal di dalam kawasan tersebut.

Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan dari semua pihak untuk memajukan desa wisata di Indonesia, baik itu pemerintah, pengelola desa wisata, masyarakat lokal, serta wisatawan itu sendiri. Dengan upaya bersama, diharapkan desa wisata di Indonesia dapat berkembang dengan baik dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat setempat serta pengunjung yang datang.

Latar belakang menggambarkan sebuah diskusi konseptual yang berkaitan dengan perkembangan desa wisata di kawasan kepulauan yaitu dalam diskusi ini, diperhatikan perkembangan sektor wisata di kawasan kepulauan dan cara meningkatkan potensi desa sebagai destinasi wisata. Pendekatan yang digunakan adalah konseptual, yang mencakup aspek strategis, konsep, dan pengembangan desa wisata di kawasan kepulauan.

Diskusi ini berkaitan dengan perkembangan desa wisata di kawasan kepulauan karena kawasan kepulauan memiliki potensi wisata yang sangat besar, baik dari segi alam sekitar, kultur, dan keunikan geografis. Namun, pengembangan desa wisata di kawasan kepulauan memiliki tingkat kendala yang tinggi, sebagai contoh, akses ke daerah, ketersediaan infrastruktur, dan ketersediaan tenaga kerja.

Untuk meningkatkan potensi desa wisata di kawasan kepulauan, perlu dilakukan pengembangan yang berorientasi pada kesehatan lingkungan, kesehatan masyarakat, dan kesehatan ekonomi. Pengembangan desa wisata di kawasan kepulauan harus memperhatikan aspek strategis, seperti pengembangan jaringan transportasi, pengembangan infrastruktur, dan pengembangan sumber daya alam dan kultur.

Dengan manajemen strategi pengelolaan desa wisata yang baik, akan berdampak pada meningkatnya jumlah wisatawan yang datang ke daerah kepulauan, sehingga dapat memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional. Selain itu, pemerintah dapat memanfaatkan pajak yang diperoleh dari desa wisata untuk pengembangan daerah kepulauan yang lebih luas. Dalam rangka mengembangkan dan memajukan pariwisata daerah kepulauan, manajemen strategi pengelolaan desa wisata yang baik sangat penting untuk diimplementasikan. Dengan demikian, dapat dihasilkan desa wisata yang berdaya saing, mampu meningkatkan ekonomi masyarakat, dan menjaga kearifan lokal serta lingkungan sekitar.

Penelitian mengenai Peran Pemerintah dalam Manajemen Strategi Pengelolaan Desa Wisata di Daerah Kepulauan memiliki pentingnya yang tidak dapat ditolak. Hal ini disebabkan ketidaksejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial di daerah kepulauan yang sangat tinggi. Pengelolaan desa wisata di daerah kepulauan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan

kesejahteraan ekonomi dan sosial di daerah tersebut. Namun, pengelolaan desa wisata di daerah kepulauan mempunyai kendala yang sangat besar, seperti ketidakmurni infrastruktur, ketidakmurni akses jalan, ketidakmurni sarana dan prasarana, dan ketidakmurni sumber daya manusia.

Peran pemerintah dalam manajemen strategi pengelolaan desa wisata di daerah kepulauan sangat penting. Pemerintah sebagai pihak yang berwenang dan berkewajiban untuk menyediakan fasilitas dan sarana yang diperlukan untuk pengelolaan desa wisata di daerah kepulauan. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan sumber daya manusia di daerah kepulauan, seperti meningkatkan kualifikasi dan kompetensi pekerja, membangun program pengembangan usaha, dan menciptakan kemajuan ekonomi di daerah kepulauan.

Penelitian mengenai Peran Pemerintah dalam Manajemen Strategi Pengelolaan Desa Wisata di Daerah Kepulauan akan menghasilkan informasi dan data yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk mengembangkan program dan strategi yang lebih efektif dan efisien untuk pengelolaan desa wisata di daerah kepulauan. Penelitian ini juga akan menghasilkan rekomendasi dan solusi untuk menghadapi kendala yang dihadapi dalam pengelolaan desa wisata di daerah kepulauan.

Pengelolaan desa wisata di daerah kepulauan merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial di daerah tersebut. Peran pemerintah dalam manajemen strategi pengelolaan desa wisata di daerah kepulauan sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial di daerah tersebut. Penelitian mengenai Peran Pemerintah dalam Manajemen Strategi Pengelolaan Desa Wisata di Daerah Kepulauan akan membantu pemerintah dalam menghasilkan program dan strategi yang lebih efektif dan efisien untuk pengelolaan desa wisata di daerah kepulauan.

II. METODE

Metode penelitian post-positivisme adalah sebuah pendekatan penelitian yang mengutamakan interpretasi, pengalaman, dan subjektivitas (Groff, 2004). Metode ini bertolak belakang dengan metode penelitian positivisme yang mengedepankan eksperimen, objektivitas, dan generalisasi. Dalam metode post-positivisme, peneliti tidak hanya mengumpulkan data melalui observasi, tetapi juga melakukan analisis kualitatif untuk memahami makna dan interpretasi subjektif dari data. Selain itu, peneliti juga mengakui bahwa dunia sosial sangat kompleks dan tidak terukur secara pasti, sehingga peneliti menggunakan pendekatan holistik dan kontekstual dalam memahami fenomena sosial (Clark, 1998). Beberapa teknik yang digunakan dalam metode post-positivisme antara lain analisis isi dan analisis naratif. Tujuan dari metode ini adalah untuk mengembangkan pemahaman yang lebih dalam dan kompleks tentang fenomena sosial yang diteliti, dari pada mencari generalisasi atau kesimpulan yang dapat diukur secara objektif (Bungin, 2007; Sugiyono, 2016). Peneliti menggunakan teori (Wheelen & Hunger, 2012) adalah sebuah teori yang terkait dengan manajemen strategi dengan melihat sejauhmana peran pemerintah dalam mengelola desa wisata di daerah kepulauan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen Strategi menurut Wheelen dan Hunger (2012) adalah proses penetapan tujuan organisasi dan merancang rencana aksi yang terkoordinasi dan terpadu untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut teori mereka, manajemen strategi terdiri dari beberapa tahap, yaitu analisis lingkungan eksternal, analisis lingkungan internal, penetapan tujuan, pemilihan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Pemerintah memiliki peran penting dalam manajemen strategi pengelolaan desa wisata di

daerah kepulauan. Namun, terdapat ketidakberhasilan rasionalitas instrumental yang tertanam dalam teori manajemen strategi secara prosedural dan pembedaan strategi secara substansi dan prosedural.

Pertama, dalam teori manajemen strategi secara prosedural, pemerintah mengikuti langkah-langkah tertentu untuk mengembangkan dan meneruskan strategi. Namun, dalam pengelolaan desa wisata di daerah kepulauan, pemerintah mungkin menghadapi ketidakberhasilan rasionalitas instrumental karena langkah-langkah tersebut tidak dapat diaplikasikan secara mendasar di lingkungan khusus daerah kepulauan. Misalnya, langkah yang berfungsi baik di daerah pedesaan tidak selalu berfungsi di daerah khusus karena faktor-faktor khusus seperti geografi, ekologi, dan infrastruktur.

Kedua, dalam pembedaan strategi secara substansi dan prosedural, pemerintah mengembangkan strategi yang sesuai dengan karakteristik daerah khusus. Namun, dalam pengelolaan desa wisata di daerah kepulauan, pemerintah mungkin menghadapi ketidakberhasilan rasionalitas instrumental karena strategi tersebut tidak dapat diimplementasikan secara mendasar di lingkungan khusus. Misalnya, strategi yang berfungsi baik di daerah pedesaan tidak selalu berfungsi di daerah khusus karena faktor-faktor khusus seperti geografi, ekologi, dan infrastruktur.

Untuk mengatasi ketidakberhasilan rasionalitas instrumental dalam pengelolaan desa wisata di daerah kepulauan, pemerintah harus mengembangkan strategi yang sesuai dengan karakteristik daerah khusus dan mengintegrasikan faktor-faktor khusus seperti geografi, ekologi, dan infrastruktur. Pemerintah juga harus mengembangkan infrastruktur dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan desa wisata di daerah kepulauan, seperti jalan, pelabuhan, dan sarana komunikasi. Pemerintah juga harus

mengembangkan program pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan usaha lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa wisata di daerah kepulauan.

A. Analisis Lingkungan Eksternal

Analisis lingkungan eksternal mencakup faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi peran pemerintah dalam manajemen strategi pengelolaan desa wisata di daerah kepulauan. Beberapa faktor tersebut antara lain:

- a. Kebijakan Pemerintah Pusat: Kebijakan pemerintah pusat dalam bidang pariwisata seperti Investasi dan Pariwisata akan berpengaruh terhadap dukungan dana dan kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan desa wisata di daerah kepulauan. Jika pemerintah pusat memberikan perhatian yang lebih besar pada pengembangan pariwisata di daerah kepulauan, maka kemungkinan besar pemerintah daerah akan menerima lebih banyak dana dan dukungan kebijakan dari pemerintah pusat. Hal ini dapat meningkatkan efektivitas program pengembangan desa wisata di daerah kepulauan, sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Di sisi lain, jika pemerintah pusat kurang memperhatikan pengembangan pariwisata di daerah kepulauan, maka pemerintah daerah mungkin akan mengalami kesulitan dalam mengembangkan program desa wisata karena dana dan dukungan pemerintah pusat tidak tersedia atau tidak mencukupi. Oleh karena itu, peran pemerintah pusat dalam memperhatikan dan memberi dukungan yang diperlukan untuk pengembangan pariwisata di daerah kepulauan sangat penting bagi kesuksesan program pengembangan desa wisata di daerah tersebut.

- b. **Potensi Lokal:** Keberadaan tempat wisata di daerah kepulauan, kondisi alam, kearifan lokal, dan budaya bisa menjadi kekuatan utama dalam pengelolaan desa wisata. Dalam pengelolaan desa wisata, penting untuk mempertahankan keseimbangan antara pelestarian alam dan kebudayaan setempat dengan pengembangan ekonomi dan pariwisata yang berkelanjutan. Dengan demikian, keberadaan tempat wisata di daerah kepulauan dapat dijadikan sebagai potensi yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat setempat, serta mempertahankan kearifan lokal dan alam yang indah dalam jangka panjang.
- c. **Kehadiran Pesaing:** Desa wisata di daerah kepulauan yang sama-sama menawarkan pengalaman wisata yang menarik bisa menjadi persaingan utama dalam jumlah pengunjung yang datang. Persaingan antar desa wisata di daerah kepulauan bisa menjadi sangat ketat karena mereka menawarkan pengalaman wisata yang hampir sama seperti pantai yang indah, keindahan bawah laut, aktivitas snorkelling atau diving, atau wisata kuliner yang khas. Oleh karena itu, setiap desa wisata perlu memperhatikan faktor-faktor seperti kualitas layanan, harga yang kompetitif, promosi yang efektif, dan inovasi dalam menawarkan pengalaman wisata yang berbeda dari pesaingnya. Hal ini bisa membantu menarik lebih banyak wisatawan untuk datang dan membantu meningkatkan pendapatan mereka
- d. **Sensitivitas Lingkungan:** Kondisi lingkungan seperti konservasi dan keberlangsungan hidup flora dan fauna menjadi sangat penting di daerah kepulauan. Hal ini sebab daerah kepulauan memiliki banyak keanekaragaman hayati sehingga perlu ada upaya untuk melestarikan dan menjaga keberlangsungan hidup flora dan fauna di daerah tersebut. Selain itu, secara moral, kita juga mempunyai tanggung jawab untuk menjaga alam demi

generasi masa depan. Secara legal, pemerintah telah menetapkan beberapa undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang perlindungan lingkungan serta sanksi bagi pelanggar.

- e. **Teknologi dan Infrastruktur:** Peralatan dan infrastruktur yang diperlukan di daerah kepulauan seperti akomodasi, jaringan komunikasi, transportasi, dan juga kemampuan untuk mengambil data dan informasi untuk pengambilan keputusan menjadi sangat penting untuk memperbaiki pengelolaan desa wisata by pemerintah.

Dalam menganalisis lingkungan eksternal ini, pemerintah dalam pengelolaan desa wisata di daerah kepulauan harus mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dan mengambil tindakan untuk memanfaatkan kekuatan dan peluang yang tersedia serta mengatasi ancaman yang muncul.

B. Analisis Lingkungan Internal

Analisis lingkungan internal pada peran pemerintah dalam manajemen strategi pengelolaan desa wisata di daerah kepulauan berfokus pada faktor-faktor internal yang mempengaruhi kemampuan pemerintah dalam mengelola desa wisata di daerah kepulauan. Beberapa faktor internal tersebut antara lain:

- a. **Ketersediaan Sumber Daya Manusia di Daerah Kepulauan.** Ketersediaan sumber daya manusia di daerah kepulauan biasanya merupakan masalah yang sering dihadapi. Hal ini disebabkan karena akses ke pulau-pulau terpencil seringkali sulit ditemui SDM yang berkualitas. Selain itu, faktor pendukung seperti infrastruktur yang kurang memadai seperti transportasi dan pendidikan juga menjadi penghambat dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.
- b. **Realisasi Anggaran di Daerah Kepulauan.** Realisasi anggaran di daerah kepulauan sama dengan realisasi anggaran di daerah lainnya, yaitu proses pelaksanaan anggaran yang

dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan membangun infrastruktur di daerah tersebut. Namun, keunikan daerah kepulauan dapat mempengaruhi realisasi anggaran karena adanya kendala-kendala seperti aksesibilitas yang sulit, ketahanan kelistrikan, dan keberlanjutan material. Untuk itu, pemerintah daerah perlu mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan anggaran di daerah kepulauan. Selain itu, pengawasan dan evaluasi terhadap realisasi anggaran di daerah kepulauan juga perlu ditingkatkan untuk memastikan anggaran terserap dengan baik dan efektif.

C. Penetapan Tujuan

Penetapan Tujuan adalah proses menciptakan tujuan dan sasaran yang jelas untuk diri sendiri, tim, atau organisasi. Tujuan yang telah ditentukan akan membantu mengarahkan upaya, menyediakan arahan, mengukur kemajuan, dan membantu dalam pengambilan keputusan. Proses penetapan tujuan biasanya melibatkan mengidentifikasi tujuan jangka panjang dan pendek, menentukan sasaran yang dapat dicapai, mengembangkan rencana tindakan, dan menetapkan jangka waktu yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Prioritas terlebih dahulu yang dianggap penting adalah pengembangan infrastruktur dan fasilitas yang memenuhi standar kesehatan, keamanan, dan kenyamanan wisatawan. Hal ini disebabkan kawasan kepulauan sering mengalami risiko bencana alam seperti tsunami, banjir, dan gempa bumi, sehingga perlunya fasilitas seperti pusat informasi, sarana transportasi, dan pengelolaan sampah yang cukup dan efisien.

Selain itu, prioritas lainnya yang harus dipertimbangkan adalah pengembangan kualitas

pelayanan dan produk wisata, seperti peningkatan kesediaan dan ketahanan ekosistem, pengembangan kuliner lokal, dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pengembangan desa wisata. Pengembangan kualitas pelayanan dan produk wisata akan membuat kawasan kepulauan lebih menarik dan mempunyai kompetitifitas tinggi dalam pasar wisata.

Pengembangan kesediaan dan ketahanan ekosistem akan meminimalisir dampak negatif dari aktivitas wisata terhadap ekosistem dan masyarakat lokal. Pengembangan kuliner lokal akan meningkatkan keunikan dan kesegaran produk wisata, serta memberi peluang bagi masyarakat lokal dalam industri wisata. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pengembangan desa wisata akan membantu masyarakat lokal dalam pengembangan desa wisata dan menjaga kesusasan dan keseimbangan ekonomi, serta menjamin keselamatan dan kesehatan masyarakat lokal.

Dalam strategi pengembangan desa wisata kepulauan, prioritas terlebih dahulu yang dianggap penting adalah pengembangan infrastruktur dan fasilitas, pengembangan kualitas pelayanan dan produk wisata, pengembangan kesediaan dan ketahanan ekosistem, pengembangan kuliner lokal, dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pengembangan desa wisata. Pemerintah harus menentukan prioritas terlebih dahulu berdasarkan kebutuhan dan potensi kawasan tersebut, dan menghubungkan prioritas terlebih dahulu dengan strategi pengembangan desa wisata yang lebih lengkap dan integratif.

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam penetapan tujuan dalam manajemen strategi pengelolaan desa wisata daerah kepulauan di Indonesia. Berikut adalah beberapa peran Pemerintah dalam penetapan tujuan tersebut:

- a. Memimpin Rencana Strategis. Pemerintah memiliki peran penting dalam memimpin rencana strategis pengelolaan desa wisata di daerah kepulauan. Pemerintah harus mampu membuat strategi yang tepat dan mengarah pada tujuan yang jelas dalam pengembangan desa wisata. Hal ini dapat dilakukan melalui penentuan target wisata yang diinginkan, serta mengembangkan infrastruktur pendukung yang dibutuhkan.
 - b. Meningkatkan Keterampilan Masyarakat. Selain memimpin rencana strategis, pemerintah juga harus memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat di daerah kepulauan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan keterampilan, seperti budi daya atau latihan pengolahan makanan, untuk meningkatkan keterampilan mereka yang berkaitan dengan pengembangan desa wisata. Pemerintah juga dapat memberikan program kerjasama dengan pihak swasta atau asing untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan masyarakat tentang industri pariwisata.
 - c. Meningkatkan Infrastruktur Pariwisata. Salah satu peran penting pemerintah dalam pembangunan desa wisata di daerah kepulauan adalah membangun infrastruktur pendukung. Hal ini meliputi pembangunan sarana dan prasarana, seperti jalan, lampu jalan, jembatan, pengembangan perumahan, dan perbaikan fasilitas umum seperti Toilet umum bahkan tempat ibadah.
 - d. Memfasilitasi Pemasaran. Pemerintah harus membantu mengembangkan kemampuan pemasaran dan promosi untuk desa wisata di daerah kepulauan. Hal ini dapat dilakukan melalui program pelatihan dan bimbingan untuk penggiat wisata lokal, serta memberikan bantuan dalam hal promosi. Pemerintah juga dapat membuka rute penerbangan ke desa wisata yang ditujukan untuk memudahkan wisatawan memasuki kawasan wisata tersebut.
 - e. Meningkatkan Pemberian Informasi. Selain memfasilitasi pemasaran, pemerintah juga harus memperkenalkan informasi tentang tujuan dan rencana pengembangan desa wisata. Informasi tersebut dapat disebarkan melalui berbagai platform, seperti brosur, media sosial, streaming video, dan program talk show. Dengan cara ini, masyarakat juga akan mengetahui tujuan pengembangan desa wisata yang sesuai dengan kepentingan mereka.
- Berdasarkan penjelasan di atas adalah bahwa peran Pemerintah sangat penting dalam penetapan tujuan dan pengembangan desa wisata di daerah kepulauan. Pemerintah harus memimpin rencana strategis, meningkatkan keterampilan masyarakat, membangun infrastruktur pariwisata, memfasilitasi pemasaran, dan meningkatkan pemberian informasi. Jika peran ini dijalankan dengan baik, maka akan tercipta dampak positif dalam perekonomian wilayah tersebut.

D. Pemilihan Strategi

Pemilihan strategi adalah proses dimana suatu organisasi atau bisnis menentukan rencana tindakan untuk mencapai tujuan jangka panjang yang ditetapkan. Pemerintah memainkan peran yang sangat penting dalam pemilihan strategi dalam manajemen strategi pengelolaan desa wisata daerah kepulauan di Indonesia. Berikut adalah beberapa peran yang dimainkan oleh pemerintah dalam hal ini:

- a. Membuat kebijakan dan peraturan yang jelas. Pemerintah memiliki peran untuk membuat kebijakan dan peraturan yang jelas tentang pengelolaan desa wisata di daerah kepulauan. Hal ini akan membantu para pengelola desa wisata untuk memahami tugas dan tanggung jawab mereka dalam menjaga keberlangsungan dan kesuksesan desa wisata.
- b. Memberikan dukungan keuangan. Pemerintah juga dapat memberikan dukungan keuangan dalam bentuk insentif atau dana

bantuan untuk mendukung pengelolaan desa wisata di daerah kepulauan. Hal ini dapat membantu desa wisata untuk melakukan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan kualitas layanan yang mereka tawarkan kepada pengunjung.

- c. Pelatihan dan pendidikan. Pemerintah dapat menyediakan pelatihan dan pendidikan kepada para pengelola desa wisata di daerah kepulauan. Tujuannya adalah agar mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam mengelola desa wisata yang sukses dan berkelanjutan.
- d. Promosi dan pemasaran. Pemerintah juga dapat mempromosikan desa wisata di daerah kepulauan untuk menarik minat wisatawan. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye pemasaran dan promosi di media sosial, situs web pariwisata, dan pameran wisata internasional.
- e. Memfasilitasi kolaborasi antara pengelola desa wisata. Pemerintah dapat memfasilitasi kolaborasi antara pengelola desa wisata di daerah kepulauan. Ini akan membantu para pengelola untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman, serta membangun kerjasama untuk meningkatkan kualitas desa wisata di daerah mereka.

Selain peran-peran di atas, pemerintah juga dapat bertanggung jawab dalam pemantauan dan evaluasi pengelolaan desa wisata di daerah kepulauan. Pemerintah dapat melakukan pemantauan secara regular untuk memastikan bahwa desa wisata tetap menjalankan aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan, serta memastikan bahwa kondisi lingkungan dan sosial di sekitar desa wisata tidak terganggu. Selain itu, evaluasi yang teratur juga dapat membantu pemerintah untuk memperbaiki dan mengevaluasi strategi yang telah dijalankan, serta memastikan bahwa desa wisata di daerah kepulauan terus berkembang dan berkelanjutan dengan baik. Dengan begitu, pemerintah dapat memainkan

peran yang sangat penting dalam memajukan pariwisata di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan desa wisata di daerah kepulauan.

E. Implementasi Strategi

Implementasi strategi yang efektif sangat penting karena strategi yang bagus hanya akan bermanfaat jika dapat dijalankan dan menghasilkan hasil yang diinginkan. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam implementasi strategi terhadap manajemen strategi pengelolaan desa wisata daerah kepulauan di Indonesia. Berikut ini beberapa peran penting pemerintah:

- a. Mendorong pembentukan desa wisata kepulauan. Pemerintah memiliki peran utama dalam mendorong pembentukan desa wisata di daerah kepulauan. Hal ini dilakukan dengan memberikan dukungan dan bantuan dalam pengembangan destinasi wisata serta menciptakan lingkungan yang memungkinkan pengembangan desa wisata dapat berjalan dengan lancar.
- b. Menyediakan fasilitas dan infrastruktur untuk wilayah kepulauan. Pemerintah juga menjadi penyedia fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan dalam pengembangan desa wisata kepulauan. Hal ini meliputi fasilitas transportasi, sarana akomodasi, dan sarana wisata lainnya seperti tempat hiburan, kuliner, dan fasilitas pendukung lainnya berbeda dengan desa wisata daratan lainnya.
- c. Mengatur dan memperluas informasi pariwisata. Pemerintah dapat mengatur dan memperluas informasi pariwisata mengenai desa wisata kepulauan yang ada di Indonesia. Caranya dengan menggunakan media sosial, situs web, dan promosi lainnya, sehingga dapat meningkatkan visibilitas desa wisata dan memungkinkan wisatawan untuk lebih mudah mengakses informasi tentang tempat wisata tersebut.
- d. Meningkatkan pengawasan dan pemantauan di daerah kepulauan pada program.

Pemerintah juga perlu meningkatkan pengawasan dan pemantauan atas kegiatan yang terjadi di desa wisata kepulauan. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir kejahatan, mencegah kerusakan lingkungan, memastikan kenyamanan wisatawan, dan juga menjaga keaslian budaya dan kearifan lokal.

F. Evaluasi Strategi

Pemerintah memiliki peran penting dalam evaluasi strategi terhadap manajemen strategi pengelolaan desa wisata daerah kepulauan di Indonesia. Berikut ini beberapa peran yang dapat dilakukan oleh pemerintah:

- a. Membuat regulasi yang jelas dan terstruktur. Pemerintah dapat membuat regulasi dan aturan yang jelas serta terstruktur mengenai pengelolaan desa wisata kepulauan. Regulasi ini dapat mencakup hal-hal seperti perizinan, pengaturan jumlah wisatawan berdekatan dengan perbatasan, aturan-aturan keamanan dan kebersihan, serta pembinaan dan pelatihan untuk pengelolaan desa wisata.
- b. Pembeda Pengembangan infrastruktur. Pemerintah dapat memperbaiki dan mengembangkan infrastruktur yang mendukung pengembangan desa wisata kepulauan yang menjadi pembeda, seperti jalan, pelabuhan, fasilitas kesehatan, fasilitas keamanan dan keselamatan, serta pemrosesan sampah.
- c. Penataan kawasan wisata di daerah pesisir. Pemerintah dapat membantu dalam pembentukan dan penataan kawasan wisata yang memadai di daerah pesisir. Penataan ini bertujuan untuk meningkatkan destinasi desa wisata di daerah kepulauan yang bagian dari garda terdepan Indonesia.
- d. Pelatihan khusus serta pembinaan pengelola desa wisata di daerah kepulauan. Pemerintah bisa membantu pelatihan dan pembinaan pengelola desa wisata dalam pengelolaan dan

pengembangan desa wisata kepulauan dalam pemetaan potensinya. Dalam hal ini, juga perlu dilakukan pembinaan pada petani lokal dan pelaku usaha mikro kecil menengah di desa wisata di daerah kepulauan khususnya daerah pesisir.

- e. Keterlibatan pengawasan dan pengendalian desa wisata kepulauan. Pemerintah harus memonitor dan mengawasi operasional desa wisata daerah kepulauan dengan tujuan menjamin pengembangan desa wisata kepulauan yang berkelanjutan. Pengawasan melalui regulasi dan motivasi dapat membantu pengelolaan desa wisata kepulauan untuk tetap mendapat perhatian yang optimal dari pemerintah.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengembangan desa wisata di daerah kepulauan memerlukan peran penting dari pemerintah. Pemerintah harus memimpin rencana strategis, meningkatkan keterampilan masyarakat, membangun infrastruktur pariwisata, memfasilitasi pemasaran, dan meningkatkan pemberian informasi untuk mencapai tujuan pengembangan desa wisata yang berkelanjutan. Selain itu, pemerintah juga dapat memainkan peran penting dalam memonitor dan mengawasi operasional desa wisata untuk menjaga keaslian budaya dan kearifan lokal. Dalam pelaksanaannya, peran pemerintah dapat diimplementasikan melalui beberapa strategi, seperti membuat kebijakan yang jelas dan terstruktur, memberikan bantuan keuangan, serta melakukan kolaborasi dengan pengelola desa wisata di daerah kepulauan.

Dalam pemilihan strategi, pemerintah harus memperhatikan faktor internal dan eksternal, seperti ketersediaan sumber daya manusia, realisasi anggaran, serta potensi dan pesaing desa wisata di daerah kepulauan. Dalam rangka mendukung pengembangan desa wisata di daerah

kepulauan, perlu adanya kerjasama yang erat antara pemerintah, pengelola desa wisata, masyarakat lokal, dan stakeholder lainnya. Dengan kerjasama yang baik dan manajemen strategi yang tepat, diharapkan desa wisata di Indonesia dapat berkembang dengan baik dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat setempat serta pengunjung yang datang. Desa wisata yang berkembang dengan baik akan meningkatkan kualitas dan daya tarik wisata, serta membawa dampak positif bagi masyarakat lokal dan perkembangan perekonomian daerah itu.

Masyarakat lokal juga memegang peranan penting dalam pengembangan desa wisata di daerah kepulauan. Masyarakat harus memahami pentingnya menjaga keaslian budaya dan lingkungan serta membangun kerjasama yang baik dengan pengelola desa wisata. Selain itu, masyarakat juga harus berperan aktif dalam mengembangkan pariwisata lokal dan meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan dalam industri pariwisata seperti kerajinan tangan, kuliner, dan pengolahan produk lokal untuk meningkatkan kualitas produk wisata yang ditawarkan. Dengan kerjasama antara pemerintah, pengelola desa wisata, dan masyarakat lokal, diharapkan dapat tercipta sebuah ekosistem pariwisata yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Dalam hal ini, pengembangan desa wisata di daerah kepulauan dapat menjadi alternatif atau diversifikasi sumber pendapatan bagi masyarakat setempat, serta memberikan kesempatan baru dalam pengembangan potensi pariwisata di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, J., Humanis, M., Alfiah, S., Andriani, J., Lesmana, R., Sunardi, N., & Furyanah, A. (2019). Manajemen Pengelolaan Desa Wisata Pada Desa Cimanggu, Kecamatan Cislak, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat (Studi Kasus pada Curug Paok dan Bukit Pasir Jaka). *Jurnal Abdi Masyarakat Humanis*, 1(1). <https://doi.org/10.32493/JAMH.V1I1.3377>
- Anggraini, R., Syakti, A. D., Idris, F., Febrianto, T., Wirayuhanto, H., & Suhana, M. P. (2022). Pengenalan Konsep Eko-eduwisata Mangrove di Desa Wisata Pengudang Kabupaten Bintan. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 8(1), 18–23. <https://doi.org/10.21107/PANGABDHI.V8I1.12463>
- Antara, M., & Arida, S. (2015). *Panduan Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Potensi Lokal*.
- Arifin, Z. A. (2017). *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Kawasan Desa Wisata Pada Kampung Bintan Bekapur Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan*.
- Bungin, M. B. (2007). *Penelitian Kualitatif*. Kencana.
- Clark, A. M. (1998). The qualitative-quantitative debate: moving from positivism and confrontation to post-positivism and reconciliation. *Journal of Advanced Nursing*, 27(6), 1242–1249. <https://doi.org/10.1046/J.1365-2648.1998.00651.X>
- Gautama, B. P., Yuliawati, A. K., Nurhayati, N. S., Fitriyani, E., & Pratiwi, I. I. (2020). Pengembangan Desa Wisata Melalui Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(4), 355–369. <https://doi.org/10.31949/jb.v1i4.414>
- Groff, R. (2004). Critical realism, post-positivism, and the possibility of knowledge. In *Volume 11 dari Routledge Studies in Critical Realism*. Routledge.
- Gurvantry, D., Febriansah, A., & Tampubolon, J. (2022). Analisis Collaborative Governance dalam Pembangunan Kawasan Desa Wisata (Studi pada Desa Wisata Ekang di Kabupaten Bintan). *PUBLICNESS: Journal*

- of *Public Administration Studies*, 1(3), 174–178.
<https://doi.org/10.24036/PUBLICNESS.V1I3.65>
- Hamid, A. W. S., Sumarti, T., & Indriana, H. (2020). Partisipasi perempuan dalam pengembangan desa wisata berbasis masyarakat dengan kontribusi terhadap pendapatan rumah tangga. *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 4(2), 235–248.
<https://doi.org/10.29244/jskpm.4.2.235-248>
- Hermawan, H. (2016). Dampak pengembangan desa wisata Ngelanggan terhadap ekonomi masyarakat lokal. *Jurnal Pariwisata*, 3(2).
<http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/jp>
- Husni, A., & Safaat, S. (2019). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 6(1), 1–17.
<https://doi.org/10.24036/SCS.V6I1.135>
- Hutabarat, J. (2006). *Proses, formasi dan implementasi manajemen strategik kontemporer: operasionalisasi strategi*. Elex Media Komputindo. <https://lib.ui.ac.id>
- Irhandayaningsih, A. (2019). Strategi Pengembangan Desa Gemawang Sebagai Desa Wisata Eko Budaya. *ANUVA*, 3(3), 283–290.
<https://core.ac.uk/download/pdf/270174795.pdf>
- Istriyani, R. (2021). Consuming leisure time: How the Tourism Trend has changed the Village. *Journal of Contemporary Sociological Issues*, 1(1), 17–34.
<https://doi.org/10.19184/CSI.V1I1.19803>
- Nofiyanti, F., Sulartiningrum, S., & Fitriana, R. (2018). Pelatihan peningkatan kualitas SDM bidang Pariwisata di Desa Wisata Cikolelet Serang Banten. *Jurnal SOLMA*, 7(2), 176.
<https://doi.org/10.29405/solma.v7i2.2228>
- Okparizan, O., Sumaryana, A., Muhafidin, D., & Sugandi, Y. S. (2019). Kapasitas Organisasi Dalam Pengembangan Pariwisata Desa : Studi Kasus Desa Wisata Kabupaten Bintan. *Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 8(1), 9–16.
<https://doi.org/10.32663/JPSP.V8I1.773>
- Purwanti, I. (2019). Strategi Kelompok Sadar Wisata dalam Penguatan Desa Wisata. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(3), 101–107.
<https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/1792>
- Putra, T. R. (2013). Peran pokdarwis dalam pengembangan atraksi wisata di Desa Wisata Tembi, Kecamatan Sewon-Kabupaten Bantul. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 9(3), 225–235.
- Raharjana, D. (2010). Membangun Pariwisata Bersama Rakyat Kajian Partisipasi Lokal dalam Membangun Desa Wisata di Dieng Plateau. *Jurnal Kawistara*, 3(2), 225–328.
- Rahma, P. D., & Primasworo, R. A. (2018). Strategi pengembangan desa wisata pesisir di Desa Tambakrejo Kabupaten Malang. *Reka Buana : Jurnal Ilmiah Teknik Sipil Dan Teknik Kimia*, 3(1), 41–52.
<https://doi.org/10.33366/REKABUANA.V3I1.917>
- Ritonga, Z. (2020). *Buku Ajar Manajemen Strategi*. Deepublish.
- Ruwanti, S., & Siti, N. (2020). Pemetaan Potensi Desa Dalam Upaya Mengembangkan Desa Wisata Di Desa Pengujan Kabupaten Bintan. *National Conference for Community Service Project (NaCosPro)*, 2(1), 32–37.
<https://doi.org/10.37253/NACOSPRO.V2I1.1165>
- Sesotyaningtyas, M., & Manaf, A. (2015). Analysis of Sustainable Tourism Village

- Development at Kutoharjo Village, Kendal Regency of Central Java. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 184, 273–280. <https://doi.org/10.1016/J.SBSPRO.2015.05.091>
- Sugiyono, S. (2016). Memahami Penelitian Kualitatif. In *Alfabeta*. Alfabeta.
- Syah, F. (2017). Strategi Mengembangkan Desa Wisata. *Proceeding SENDI_U*. <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/sendu/article/view/5048>
- Tim Asisten Penelitian Autorin. (2021). *Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Masyarakat*. <https://blog.atourin.com/destination/pengelolaan-desawisata-berbasis-masyarakat/>
- Trisnawati, A. E., Wahyono, H., & Wardoyo, C. (2018). Pengembangan Desa Wisata dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal. *Jurnal Pendidikan*, 3(1), 29–33. <https://doi.org/10.17977/JPTPP.V3I1.10356>
- Wheelen, T. L., & Hunger, J. D. (2012). *Strategic management and business policy: Toward global sustainability* (13th ed.). Pearson Prentice Hall.
- Widnyani, I. A. P. S. (2022). Collaborative Governance In Eco-Tourism Area Management In Kelating Traditional Village, Tabanan Regency. *International Journal of Social and Public Administration*, 2(1). <http://journal.unas.ac.id/ijsa/article/view/1863>.